



JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jUPIIS>

Konflik Poso : Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya

Conflict in Poso: History and the Resolution Efforts

Ilovia Aya Regita Widayat, Diana Mutiara Bahari, Azka Azzahra Salsabila, Nabila Rizky Sri Handayani & Hanna Khairunnisa Adjie*

Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 20 Juni 2020; Direview: 20 Juni 2020; Dipublish: 21 Januari 2021

Abstrak

Tulisan ini menganalisa Konflik Poso dengan menjelaskan sejarah terjadinya konflik social yang terjadi di Kabupaten Poso yang di mulai tahun 1992, upaya penyelesaian dan keadaan pasca konflik. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan studi kasus yang menggunakan sumber-sumber bacaan, literature, journal, buku dan media cetak online yang berkaitan dengan penelitian ini. Tulisan ini menggunakan dua pendekatan yaitu teori konstruktivisme dan konflik social untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor utama konflik sosial yang terjadi di poso bukan hanya karena dominansi agama, juga adanya perpindahan kekuasaan baik secara politik, ekonomi dan social. Dalam penyelesaiannya menemui berbagai kendala dan negosiasi sampai menemukan kesepakatan damai yang mewakili kepentingan kedua pihak. Secara umum konflik ini dilihat sebagai konflik yang mengatasnamakan agama yang mendominasi yaitu Islam dan Kristen. Konflik ini dilatar belakangi oleh tergesernya tatanan sosial yang mana masyarakat asli poso yang sebagian besar menganut kepercayaan Kristen yang merasa dimarjinalkan oleh kaum pendatang khususnya dari Jawa yang sebagian besar beragama Islam. Maka hal ini membuat system social berpindah dimana kaum pendatang lebih mendominasi dari segi politik, ekonomi dan sosial sehingga menimbulkan sentimen.

Kata Kunci: Konflik Poso, Konflik Sosial, Konstruktivisme.

Abstract

This paper analyzes Poso Conflict by explaining the history of social conflicts that occurred in Poso District which began in 1992, trying to resolve and deal with post-conflict situations. In this study the authors used a case study research method that uses reading, literature, journal, book and online print media sources related to this research. This paper uses two arguments namely constructivism theory and social conflict to answer the debate in this research. The results of this study stated that the main factor of social conflict that occurred in Poso was not only due to the dominance of religion, there was also a transition effect both with political, economic and social. In the solution, the meeting and negotiations found an agreement between the two parties. In general, conflicts that are seen as conflicts in the name of challenging religions are Islam and Christianity. This conflict is motivated by the displacement of the social order in which the indigenous Poso people who largely adhere to Christian beliefs are marginalized by special migrants from Java who are mostly Muslim. So this makes the system of social displacement while migrants are superior in terms of political, economic and social, causing sentiment.

Keyword: Conflict of Poso, Social Conflict, Constructivism.

How to Cite: Widayat, I.A.R, Bahari, D.M. Salsabila, A.A. Handayani, R.S. & Adjie, H.K. (2021). Konflik Poso: Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 13 (1): 1-9.

*Corresponding author:

E-mail: iloviaaregitaw@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Kota Poso terletak di ibu kota Kabupaten Poso. Posisi Poso terletak di tengah Pulau Sulawesi, di pesisir Teluk Tomini dan menjadi sebuah pelabuhan dan perhentian utama di pesisir tengah bagian selatan Teluk Tomini. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 24.197 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 132.032 jiwa. Secara administrasi, daerah ini terbagi menjadi 13 kecamatan (Dinas Kominfo Dan Persandian Kabupaten Poso, 2011).

Mata pencarian penduduk Poso selain pertanian, perdagangan juga menjadi tumpuan dan harapan bagi warga Poso. Hasil pertanian dan perdagangan merupakan hal yang saling berhubungan dan berdampak besar bagi perekonomian Kota Poso. Poso memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan seperti pada sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada, dan jambu mete.

Dalam kegiatan pertanian, tanaman pangan masih menjadi andalan yang utama berupa padi, tanaman hortikultura dan palawija. Keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus interaksi pengiriman barang maupun jasa. Saat ini Kabupaten Poso telah memiliki bandara domestik yaitu Bandara Kasiguncu yang mulai kembali beroperasi sejak 2005, sejumlah maskapai penerbangan swasta seperti Merpati, Wings Air dan Lion Air memiliki beberapa jadwal dan rute penerbangan dari dan ke Poso.

Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una Una dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya. Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni: Wilayah Bagian Selatan tunduk

kepada Kerajaan Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk di bawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Donggala) dan khusus wilayah bagian Timur, yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate (Riki, 2020).

Konflik Poso yang dilatarbelakangi oleh faktor agama dapat dianalisa dengan menggunakan teori konstruktivisme dan teori konflik sosial. Kaum konstruktivisme melihat dunia sebagai konstruksi sosial. Konstruktivisme berpendapat bahwa agensi dan struktur saling membentuk satu sama lain, singkatnya struktur mempengaruhi agensi dan agensi mempengaruhi struktur. Dalam hal ini, agensi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak, sedangkan struktur mengacu pada sistem internasional yang terdiri dari elemen material dan ideasional (Theys, 2018).

Teori konstruktivisme dicirikan dengan adanya penekanan atas pentingnya normatif serta struktur material, serta mengenai peran identitas dalam membentuk aksi politik dan pada hubungan yang saling konstitutif antara agen dan struktur. Jadi singkatnya, konstruktivisme menekankan pada 3 hal yang melatarbelakangi agen dalam pembentukan suatu keputusan, yaitu konstruksi sosial, identitas aktor, dan kepentingan (Reus-Smit, 2005).

Terkait dengan penerapan teori konstruktivisme dalam penyelesaian Konflik Poso, penulis menyimpulkan bahwa konstruksi sosial atau yang menjadi dasar kedua belah pihak menyelesaikan pertikaian adalah adanya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jelas disebutkan dalam sila ke 2 bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke 3 persatuan Indonesia, sila ke 4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Melihat dasar Pancasila tersebut, Konflik Poso merupakan suatu tindakan yang bersebrangan dengan Pancasila.

Hal kedua adalah identitas actor, dimana dalam Konflik Poso aktor yang berperan dari segi agama, yaitu Islam dan Kristen. Hal ketiga adalah kepentingan kedua belah pihak yang bisa dikatakan bahwa kedua belah pihak menginginkan adanya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera meskipun dengan perbedaan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Poso. Akhirnya dari ketiga hal tersebut, melahirkan sebuah aksi yaitu musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pertikaian.

Konflik memberikan perspektif ketiga mengenai kehidupan sosial. Berbeda dengan kaum fungsionalis yang memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang harmonis dan dapat bekerjasama dalam menyelesaikan suatu konflik. Konflik mengacu pada suatu proses interaksi dalam penyelesaian suatu masalah di mana cara yang dipilih oleh para pihak yang bersangkutan cenderung menimbulkan kerusakan, bahaya, cedera bahkan menimbulkan kematian (Oberschall, 1978).

Pada dasarnya konflik terbagi menjadi tiga jenis, yang pertama konflik horizontal yang merupakan konflik yang terjadi antara individu maupun kelompok yang memiliki kesamaan status sosial. Kedua, adalah konflik vertikal yang merupakan konflik yang dapat timbul antara individu maupun kelompok yang memiliki kewenangan, kekuasaan serta status sosial yang berbeda. Jenis konflik terakhir adalah konflik perbatasan yang merupakan konflik pertentangan mengenai hak kepemilikan atau control sebidang tanah antara dua negara atau lebih negara (Hi Manna & Kencana Syafiie, 2014).

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai perjuangan atas nilai-nilai atau klain atas status, kekuasaan dan sumber daya yang langka. Tujuan dari kelompok-

kelompok yang berkonflik tidak hanya untuk mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan akan tetapi juga untuk melukai atau menghilangkan saingan. Konflik sosial mencakup berbagai fenomena sosial, seperti konflik ras, agama serta komunal seperti kerusuhan, pemberontakan revolusi, demonstrasi dan sejenisnya. Secara umum, setidaknya terdapat tiga hal yang menyebabkan terjadinya konflik sosial yaitu (1) perebutan sumber daya, alat produksi, dan peluang ekonomi, (2) perluasan batas kelompok sosial-budaya, (3) konflik kepentingan politik, ideologi dan agama (Harahap & Hasibuan, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan berupa studi kasus mengenai Konflik Poso. Pertikaian antar agama mayoritas di Poso yaitu Islam dan Kristen menjadi latar belakang terjadinya konflik. Kedatangan masyarakat Muslim ke Poso dan menguasai berbagai sektor menjadikan penduduk asli Poso (Kristen) merasa tersingkirkan. Kecemburuan sosial ini kemudian menjadi konflik besar dari tahun 1992 hingga penyelesaian terjadi tahun 2001. Berbagai penyelesaian dilakukan akan tetapi, konflik Poso kemudian menjadi alat politik bagi elit untuk memobilisasi kepentingannya.

Dalam upaya menjelaskan proses penyelesaian Konflik Poso, penulis memfokuskan tulisan pada studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Tulisan ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang mencakup buku, artikel, surat kabar, serta sumber lain yang terkait dengan persoalan pokok penelitian. Data yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan analisis kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Poso

Pada dasarnya Poso sering disebut sebagai simbol bhinneka tunggal ika dari Indonesia yang ditempati oleh keberagaman budaya, suku, dan agama. Keberagaman tersebut dapat membuat mereka hidup damai dan berdampingan sampai pada tahun 1992 terjadilah pertikaian sosial dan sentimen sosial yang dipercaya perbedaan agamalah sebagai pemicu konflik sosial di daerah Poso. Seperti yang telah disebutkan di latar belakang. Bahwa dominansi agama di Poso adalah Kristen dan Islam yang dimana perbedaan tersebut sangat eksklusif untuk dijadikan pemicu konflik oleh beberapa pihak dan menjadi jembatan untuk mendapatkan posisi politik.

Secara historis percikan konflik ini bermula pada tahun 1992 ketika terjadi beberapa peristiwa pertikaian para keluarga politisi di Poso. Kemudian dilanjutkan lagi pertikaian pada tahun 1995. Dimana dua peristiwa tersebut dilabeli atas nama agama sehingga membuat beberapa orang tidak terima dan merasa harus ikut campur. Namun kedua pertikaian ini akhirnya bisa di redam dan didamaikan sehingga suasana kembali normal. Beberapa rangkaian peristiwa konflik juga sempat terjadi antar suku dan komunitas, sampai akhirnya pada tahun 24 Desember 1998 ketika rezim orde baru jatuh dimana pada saat ini Indonesia mengalami krisis dan pergantian pola pemerintahan demokratis sehingga hal ini juga menjadi pemicu konflik Poso kembali meanas dan lebih *masiv* (Alganih, 2016). Konflik sosial (SARA) ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan ekonomi yang mengatasnamakan agama. Pada saat itu jika ditinjau secara historis penduduk asli Poso merasa termajinalkan dengan datangnya penduduk lain. Mereka yang sebagian beragama Kristen merasa identitas atas daerahnya sudah pudar terutama jika ditinjau dari status sosial (Alganih, 2016).

Kehadiran pendatang yang sebagian muslim telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi penduduk asli Poso. Dimana dipercaya para pendatang mengambil alih dan menguasai berbagai aspek sosial, ekonomi dan politik. Seperti pada saat itu pendatang lebih mendapatkan keuntungan besar pada tanaman coklat di tahun 1992. Karena latar belakang tersebut terjadilah kesenjangan sosial bagi penduduk asli yang merasa tersingkirkan. Selain itu faktor pemicu konflik mereka (penduduk asli) merasa tersaingi pada status politiknya. Dimana kursi kepemimpinan diambil alih oleh pendatang (muslim) (Adam & Malkan, 2017). Dimana elit politik muslim mendapatkan keuntungan kursi kekuasaan pada saat pemilu. Padahal sebelumnya, ketika belum diterapkannya desentralisasi Poso menganut konsep *sharing power* yang ditinjau karena dominasi agama untuk menghormati keberagaman sampai rotasi *power sharing* ini berakhir pada tahun 1999. Pada tahun ini komposisi politik atas nama SARA tidak lagi menjadi formula politik melainkan berdasarkan suara terbanyak dan kebetulan pada kepemimpinan setelah orde baru kursi kepemimpinan di Poso kebanyakan di pimpin oleh muslim.

Faktor selanjutnya yang paling mendasar adalah kondisi demografis keberagaman dengan berbagai perbedaan menjadi potensi terjadinya konflik sosial karena sangat mudah untuk terjadi provokasi satu sama lain untuk terlibat dalam konflik komunal (Alganih, 2016). Sehingga seringkali menjadi senjata bagi ampuh untuk bagi para elit untuk menjadikan kendaraan politiknya ketika bersaing dengan memobilisasi masa menggunakan isu sensitive sehingga memancing konflik berkelanjutan yang massiv.

Upaya Penyelesaian Konflik

Kerusuhan yang terjadi di Poso banyak mengundang perhatian masyarakat Indonesia. Banyaknya korban jiwa yang

berjatuhan dari masing-masing pihak mendorong kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian untuk mengakhiri kerusuhan yang terjadi. Ada banyak inisiatif penyelesaian konflik yang dilakukan oleh elite provinsi dan kabupaten. Akan tetapi, upaya penyelesaian konflik justru tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, penyelesaian konflik juga diupayakan dari kalangan pemuka agama. Akan tetapi, dengan terlibatnya pemuka agama sangat disesalkan, karena tindakannya bukannya mengupayakan perdamaian bagi kelompoknya, justru pemuka agama melibatkan diri dalam konflik, sehingga membuat konflik menjadi semakin rumit dengan nuansa perang agama.

Salah satu upaya perdamaian yang paling penting dan berpengaruh adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001. Upaya perdamaian ini merupakan inisiatif pendeta A. Tobondo yang menghubungi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan atau Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat atau Jusuf Kalla, dan Menteri Pertahanan atau Abdul Jalil. Pendeta A. Tobondo meminta agar pemerintah segera mengupayakan perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah. Permintaan pendeta A. Tobondo mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah melalui Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, Jusuf Kalla yang kemudian ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya perdamaian di Poso. Alasan utama Jusuf Kalla ditunjuk menjadi pemimpin mediator di Poso karena Jusuf Kalla juga berasal dari Sulawesi dan juga memiliki jaringan yang luas dan kuat di Sulawesi. Dalam proses penanganan konflik di Poso, pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi upaya perdamaian di Poso sedangkan yang menjadi penentu dalam penyelesaian konflik merupakan masyarakat yang bertikai yaitu dari kelompok Islam dan

Kristen (Centre for Humanitarian Dialogue, 2011).

Pada 18 Desember 2001 hingga 20 Desember 2001, Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dan melakukan mediasi antara kedua pihak yang bertikai di Poso. Pertemuan tersebut diadakan di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 25 peserta dari kelompok agama Islam, 25 peserta dari kelompok Kristen, dan 25 peserta sebagai mediator yang terdiri dari Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, H. Zainar Basri Palaguna selaku Gubernur Sulawesi Selatan, Aminudin Ponulele selaku Gubernur Sulawesi Tengah, Pangdam VII/Wirabuana yaitu Mayjen Ahmad Yahya dan Kapolda Sulawesi Tengah yaitu Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia yang diwakili oleh Din Syamsudin, Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) yang diwakili oleh pendeta Natan Setiabudi, dari kantor Polkam ada Mayjen Bambang Sutedjo dan perwakilan dari Mabes TNI adalah Mayjen Suwisma (Wahid & Ihsan, 2004).

Pertemuan dan mediasi antara kedua belah pihak yang bertikai menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan bekerjasama untuk menjaga perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah. Proses mediasi yang dipimpin oleh Jusuf Kalla melahirkan deklarasi bersama yang ditandatangani oleh semua pihak dari kedua belah pihak yang menghadiri pertemuan di Poso, pejabat tinggi Sulawesi, dan beberapa aparat yang berwajib. Deklarasi tersebut kemudian dikenal dengan Deklarasi Malino yang mencakup 10 poin yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesepuluh poin yang disepakati adalah:

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan
2. Mematuhi proses penegakan hukum dan mendukung upaya pemerintah dalam menjatuhkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran

3. Meminta aparat negara untuk bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan
4. Untuk menjaga terciptanya situasi damai, menolak memberlakukan darurat sipil dan campur tangan dari pihak asing
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap seluruh pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama
6. Tanah Poso merupakan bagian integral dari Republik Indonesia. Sehingga, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan terjadi
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asalnya masing-masing
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana prasarana ekonomi secara menyeluruh
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya, serta ketentuan lainnya.

Dengan disepakatinya Deklarasi Malino, Jusuf Kalla berharap adanya gencatan senjata ini akan membuka jalan bagi solidaritas dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. HZB Palaguna mengatakan bahwa perjanjian damai adalah langkah yang tepat untuk menghentikan kerusuhan yang terjadi di Poso. Perwakilan dari Poso juga memuji

adanya gencatan senjata dalam upaya membangun perdamaian dan ketertiban pihak yang bertikai. Kepala Kepolisian Nasional, Jenderal Da'i Bachtiar percaya Deklarasi Malino merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Poso untuk memiliki kehidupan yang damai seperti sebelum konflik (United Nation Peacemaker, 2001).

Keadaan Pasca Konflik Poso

Masyarakat Poso, telah lebih dari satu dekade pasca Deklarasi Malino pada Desember 2001, hingga saat ini belum merasakan kedamaian sejati dari tragedi kemanusiaan di masa lampau yang pernah mereka alami bersama. Pasca kesepakatan damai itu dilakukan, terdapat berbagai pendapat bahwa kondisi sekarang ini warga Sulawesi Selatan sudah tidak ingin mengingat lagi perihal konflik poso ini dan juga muncul sejumlah hambatan rekonsiliasi menjadi penghalang bagi perdamaian. Traumatik masa lalu, dendam, ketidakpuasan damai dan ketidakpercayaan (*distrust*) merupakan indikasi-indikasi kegagalan rekonsiliasi masyarakat Poso sebagai satu fakta yang tidak terhindarkan dalam kelangsungan rekonsiliasi saat ini (Nutfa & Anwar, 2015).

Untuk sisi positifnya, masyarakat Sulawesi Tengah sudah tidak ingin lagi mengingat kerusuhan yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen ini, sehingga masyarakat Sulawesi Tengah saat ini bisa hidup berdampingan. Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah, Syamsuridjal Anggo mengatakan bahwa antaragama sekarang sudah saling toleransi dan menghargai. Sebagai contoh, orang yang pakai jilbab lewat di desanya orang yang non-Muslim pun tidak ada masalah pada waktu malam hari bahkan ketika sedang sendirian. Artinya disini dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi konflik-konflik itu. Semua ini tidak lepas dari peran FKUB telah banyak berperan dalam merawat kerukunan umar beragama atau menyelesaikan konflik keagamaan di

Indonesia. Salah satunya, yaitu saat ini masyarakat Sulawesi Tengah sudah melupakan konflik agama yang sempat terjadi di Poso. Namun memang masih ada sedikit konflik saat ini, hanya saja itu tinggal konflik-konflik kecil saja, yang itu pun bukanlah konflik antaragama melainkan antarkelompok tertentu dengan aparat (Muhyiddin, 2017).

Dapat dilihat bahwa sebenarnya kedamaian yang dicari dalam penyelesaian konflik di Poso ini belum sepenuhnya bisa didapatkan. Kegagalan rekonsiliasi yang dialami masyarakat Poso setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, keterikatan masyarakat pada kondisi masa lalu dan kekhawatiran masyarakat pada kondisi sosial masa kini yang mengancam perdamaian. Dugaan ini diperkuat dengan wilayah-wilayah pasca konflik umumnya menghadapi masalah konflik dalam tiga jenis, yaitu akar konflik di masa lalu yang belum terselesaikan, pendorong konflik akibat perubahan yang terjadi di kemudian hari, dan dampak konflik pada masyarakat. Sementara di sisi lain, juga memiliki tiga jenis potensi perdamaian, yaitu akar nilai-nilai perdamaian, pendorong perdamaian perubahan yang hendak terjadi, dan kapasitas lokal untuk perdamaian.

Beberapa penelitian menemukan bahwa rekonsiliasi masyarakat Poso pada Desember 2001 sungguh tidak melibatkan masyarakat sipil. Deklarasi Malino hanya disepakati oleh tokoh kedua agama sehingga mengabaikan kepentingan damai masyarakat akar rumput sehingga menjadi cikal bakal ketidakpuasan damai masyarakat. Akibatnya rekonsiliasi masyarakat Poso mengarah pada kegagalan nyata (Ruagadi H, 2010). Begitu pula Canggara, hasil penelitian bahwa indikasi kegagalan rekonsiliasi masyarakat Poso karena rekonsiliasi hanya difasilitasi oleh pihak ketiga, sehingga berpeluang menjadi kekerasan berdalil agama (Nutfa et al., 2016). Pelibatan masyarakat sangat diperlukan terutama bila didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian lain

juga menemukan pula bahwa pasca konflik, masyarakat Poso masih terikat dengan kondisi masa lalu, yang melahirkan sentimen kelompok, melebarnya peluang segregasi dan relasi sosial kian (Katemba G, 2015).

Faktor keterikatan pada kondisi masa lalu adalah bayangan atau ingatan tentang peristiwa konflik sebagai sebuah tragedi sosial yang memberi kesan buruk dalam kehidupan masyarakat Poso pasca konflik. Kondisi ini layaknya virus yang menular pada generasi muda pasca konflik melalui sosialisasi yang diperoleh dari cerita-cerita terutama dalam lingkungan keluarga. Sementara itu, kekhawatiran pada kondisi saat ini yang mengancam perdamaian justru menjadi penguat bayangan masa lalu dan merupakan akumulasi dari kecemasan kolektif akibat tidak terpenuhinya kebutuhan rasa aman yang selama ini didambakan. Kedua faktor di atas merupakan dua elemen pada dua sisi mata uang yang sama, sebagai akibat dari tidak terpenuhinya harapan damai dan tidak hilangnya akar-akar konflik lama. Galtung berpendapat bahwa tujuan utama menciptakan perdamaian dimulai dari mengubah sikap protagonis, menjaga komitmen damai, meminimalisir perilaku merusak dan membangun perdamaian sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi yang terletak pada akar konflik (Hugh Miall; Oliver Ramsbotham; Tom Woodhouse, 2000).

Sementara itu, keadaan ideal pasca konflik apabila kesejahteraan berupa rasa aman, kedamaian dan keharmonisan telah dirasakan kembali masyarakat sehingga merasa betah untuk mendiami suatu wilayah bekas konflik di mana mereka berada (Ismail, n.d.). Nutfa & Sakaria, berpendapat bahwa membangun perdamaian pasca konflik yang ideal adalah melalui rekonstruksi trust yang terdiri dari empat indikasi yaitu, menggiring individu untuk berorientasi kelompok (asosiasi), membudayakan kerjasama, menumbuhkan sifat jujur dan membudayakan sikap

loyalitas atau altruisme demi kepentingan Bersama (Nutfa & Anwar, 2015). Dua faktor kegagalan rekonsiliasi di atas memberi makna bahwa pasca konflik masyarakat Poso belum sepenuhnya mencapai suatu keadaan ideal yang bebas dari hambatan-hambatan rekonsiliasi sehingga komitmen damai yang dijunjung tinggi mampu membawa suasana harmonis sebagaimana sebelum konflik.

SIMPULAN

Konflik yang terjadi di Poso merupakan konflik antar agama yang juga ditunggangi oleh konflik kepentingan beberapa elit. Adanya kecemburuan sosial antara dua agama dominan di Poso yaitu Islam dan Kristen yang menjadi akar konflik Poso. Dominasi masyarakat Muslim sebagai pendatang dalam jabatan politik membuat masyarakat Kristen merasa termajinalkan. Posisi Poso yang strategis menjadikan perebutan kekuasaan kerap kali terjadi. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan ini sering digunakan oleh elit politik untuk dijadikan alat mobilisasi kepentingannya dengan mengangkat isu sensitif, seperti agama.

Berbagai penyelesaian telah dilakukan oleh elit Poso yang berkonflik yaitu masyarakat Muslim dan Kristen untuk meredam konflik. Upaya penyelesaian Konflik Poso juga dibantu oleh pemerintah pusat yang kemudian melahirkan perjanjian antara kedua belah pihak. Melalui diskusi yang alot, Deklarasi Malino menjadi hasil dari kesepakatan bersama. Dirumuskannya sepuluh poin Deklarasi Malino diharapkan dapat mengakhiri konflik yang terjadi.

Beberapa masyarakat Poso sudah melupakan kejadian kelam tersebut, namun juga tidak sedikit yang masih belum melupakan. Pasca penyelesaian tahun 2001 lalu, konflik antar agama Poso masih terjadi. Hal ini dikarenakan perbedaan yang ada dan belum adanya sikap ingin berdamai dari kedua belah pihak. Cerita kelam masa lalu kemudian menurun kepada generasi

muda berakibat pada sentimen agama belum usai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, & Malkan. (2017). Dinamika Konflik di Kabupaten Poso. *ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah*.
- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*.
<https://doi.org/10.36706/JC.V5I2.4814>
- Centre for Humanitarian Dialogue. (2011). *Conflict Management in Indonesia – An Analysis of the Conflicts in Maluku , Papua and Poso The Indonesian Institute of Sciences , Current Asia and the Centre for Humanitarian Dialogue*. June.
- Dinas Kominfo Dan Persandian Kabupaten Poso. (2011). *Sejarah Kabupaten Poso*. Pemerintah Kabupaten Poso.
<https://www.posokab.go.id/sejarah-kabupaten-poso/>
- Harahap, S., & Hasibuan, S. (2017). The Phenomenon of Social and Religious Conflicts in Tanjungbalai , Medan , Indonesia. *IOSR-Journal of Humanities and Social Science*, 22(8), 31–39.
<https://doi.org/10.9790/0837-2208063139>
- Hi Manna, Z., & Kencana Syafie, I. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(2), 225–256.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0009>
- Hugh Miall; Oliver Ramsbotham; Tom Woodhouse. (2000). *Resolusi damai konflik kontemporer: menyelesaikan, mencegah, melola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*. RajaGrafindo Persada.
- Ismail, F. (n.d.). *Dinamika kerukunan antarumat beragama : konflik, rekonsiliasi, dan harmoni*.
- Katamba G. (2015). *Keberlangsungan Perdamaian Di Poso: Studi Kasus Interaksi Sosial Masyarakat Poso Pasca Konflik Di Kelurahan Kayamanya*. Tesis Pascasarjana UNHAS.
- Muhyiddin. (2017, November). *Masyarakat Sulawesi Tengah Telah Lupakan Konflik Poso | Republika Online*. Republika.Co.Id.
- Nutfa, M., & Anwar, S. (2015). Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust. *Kritis*, 1(1), 133–142.
- Nutfa, M., Pulubuhu, D. A. T., & Cangara, S. (2016). Kegagalan Rekonsiliasi Masyarakat Poso Pasca Konflik Komunal. *Jurnal Analisis*, 5(2), 168–174.
- Oberschall, A. (1978). Theories of Social Conflict. *Social Movements*, 4, 291–315.
<https://doi.org/10.4324/9781315129631-2>
- Reus-Smit, C. (2005). Constructivism. In *Introducing International Relations* (Third, pp. 188–212).

- Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.4324/9781315099064-4>
- Riki. (2020). *HUT 125 Tahun, Poso Kota Sejarah*. Kaili Post. <https://kailipost.com/2020/03/hut-125-tahun-poso-kota-sejarah.html>
- Ruagadi H. (2010). Konflik dan Tindak Kekerasan Poso: Tinjauan Sosiologis tentang Persepsi Masyarakat. In *Tesis Pascasarjana UNHAS*.
- Theys, S. (2018). Introducing Constructivism in International Relations Theory. *E-International Relations*, 1-4. <https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-constructivism-in-international-relations-theory/>
- United Nation Peacemaker. (2001). *Malino Declaration Signed by the Two Warring Parties to End Conflict and Create Peace in Poso, Central Sulawesi*.
- Wahid, A. Y. (Achmad Y., & Ihsan, A. B. (2004). *SBY dan resolusi konflik: langkah-langkah penyelesaian konflik di Aceh, Atambua, Maluku, Papua, Poso, dan Sampit*. Relawan Bangsa.